

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sri Subekti

Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Pandanaran Semarang
Jl. Banjarsari Barat No. 1 Tembalang Semarang 50275
Email* : bek1_04@yahoo.com

ABSTRAK

Lingkungan hidup hampir selalu dikaitkan dengan kerusakan dan pencemaran. Permasalahan yang dihadapi oleh kota Banjarbaru berupa sistem drainase yang buruk akibat topografi yang datar dan diperparah dengan sungai yang mati dan pembangunan perumahan baru/jalan yang tidak mempunyai saluran drainase. Berdasarkan analisa daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem produksi primer dapat diketahui kategori rendah ketika tata guna lahan di daerah tersebut berupa: Pertanian lahan kering, Terbuka, Sawah, Tambak, Permukiman, Pertambangan, Transmigrasi, Tubuh Air, Rawa. Hal yang penting adalah keterlibatan masyarakat sejak awal secara utuh mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan.

Kata Kunci: lingkungan hidup, drainase, daya tampung lingkungan.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam telah dimanfaatkan sebagai modal utama dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang diuraikan dalam RPJM Kalimantan Selatan. Pemanfaatan sumber daya alam yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan akan berimplikasi terhadap potensi kerusakan sumber daya alam. Pola pemanfaatan sumber daya alam yang diatur dalam suatu penataan kawasan lindung, kawasan konservasi dan kawasan budidaya, yang mendukung pembangunan saat ini masih belum dilaksanakan secara optimal.

Lingkungan hidup hampir selalu dikaitkan dengan kerusakan dan pencemaran sumberdaya alam yang kemudian disebut sebagai kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Untuk mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dijalankan instrumen penegakan hukum lingkungan serta sejumlah instrumen lainnya termasuk pengendalian dampak pembangunan, seperti AMDAL. Adapun isu-isu terkait dengan hutan dan lahan, maupun isu-isu lingkungan perkotaan dikendalikan melalui pelaksanaan berbagai

kebijakan yang terkait dengan pelestarian keanekaragaman hayati, kebersihan kota, sungai, pesisir, dan lain-lain.

Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ekoregion merupakan unit atau satuan wilayah dalam melakukan inventarisasi lingkungan hidup (pasal 6) dan menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam (pasal 8). Selanjutnya disebutkan bahwa ekoregion adalah sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang merupakan kewajiban dari semua tingkatan pemerintahan, mulai dari Pusat, Pemerintahan Provinsi sampai Pemerintahan Kabupaten dan Kota (pasal 9).

Selama ini kebijakan, rencana dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih belum sesuai dengan kondisi eksisting lingkungan hidup. Dengan memperhatikan amanat Pasal 10 Ayat (1) undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka Gubernur sesuai dengan kewenangannya

menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat provinsi.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Penyusunan RPPLH wajib hukumnya memperhatikan keragaman serta karakteristik fungsi ekologis, kepadatan penduduk, sebaran potensi SDA, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, serta adanya pengaruh perubahan iklim. Analisis berbasis ekoregion akan memperjelas arah penekanan perbedaan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara keseluruhan. Hal ini akan memperkuat pula perencanaan pembangunan nasional dan wilayah, terlebih secara gamblang mandat dalam UU Nomor 32/2009 dinyatakan bahwa RPPLH dijadikan dasar dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

PERMASALAHAN

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup.

Masalah-masalah perkotaan yang harus dihadapi kota Banjarbaru yakni sebagai berikut:

1. Sistem drainase yang buruk akibat topografi yang datar dan diperparah dengan sungai yang mati dan pembangunan perumahan baru/jalan yang tidak mempunyai saluran drainase.
2. Pencemaran air yang besar di kota Banjarbaru akibat pembuangan limbah rumah tangga ke sungai.
3. Pemanfaatan ruang yang digunakan untuk pertambangan sehingga menyebabkan permasalahan, bekas tambang perlu rekonstruksi ulang untuk pembangunan dan pengembangan pemukiman.
4. Jumlah persebaran fasilitas umum di kawasan Kota Banjarbaru yang belum

cukup maksimal untuk melayani kebutuhan termasuk untuk penyediaan lahan untuk PKL dan sarana parkir.

Secara umum permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan berupa:

1. Belum mantapnya penegakan hukum menyangkut illegal logging, illegal fishing dan illegal mining.
2. Pemanfaatan SDA-LH kurang memperhatikan kaidah konservasi sehingga menyebabkan pertambahan luasan lahan kritis, rusaknya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
3. Kurangnya komitmen perusahaan terhadap pemulihan lingkungan hidup.
4. Sering terjadinya banjir, tanah longsor, dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
5. Meningkatnya pencemaran udara, tanah dan air.
6. Belum sinkron RTRWP dengan RTRWK.
7. Belum optimalnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, dan secara internal kelembagaan masih kurangnya data dan informasi yang terkait PSDAL.

Adapun isue strategis dan isu pokok dalam Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah:

1. Tingginya ketergantungan pada sektor pertambangan
2. Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
3. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
4. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Permasalahan peraturan perundang-undangan terkait dengan sumber daya alam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan potensial).

Kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian lahan berdasarkan data sifat biofisik tanah atau sumber daya lahan sebelum lahan tersebut diberikan masukan-masukan yang diperlukan untuk mengatasi kendala. Data biofisik tersebut berupa karakteristik tanah dan iklim yang berhubungan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang dievaluasi. Kesesuaian lahan potensial menggambarkan kesesuaian lahan yang akan dicapai apabila dilakukan usaha-usaha perbaikan

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfir, atmosfir, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.

Kemampuan lahan adalah karakteristik lahan yang mencakup sifat-sifat tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain untuk mendukung kehidupan atau kegiatan pada suatu hamparan lahan.

Kemampuan lahan adalah karakteristik lahan yang mencakup sifat-sifat tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain untuk mendukung kehidupan atau kegiatan pada suatu hamparan lahan (Permen LH Nomor 17 tahun 2009).

Kemampuan lahan memiliki karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain. Berdasarkan karakteristik lahan tersebut, dapat dilakukan klasifikasi kemampuan lahan ke dalam tingkat kategori kelas, sub kelas, dan unit pengelolaan.

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Mengingat pentingnya lingkungan hidup maka diperlukan suatu usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Kota Banjarbaru juga memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan sebagai berikut ini :

1. Secara fisik alam, kemiringan lahan Kota Banjarbaru yaitu 0-8 % termasuk kategori datar, sehingga berpotensi untuk melakukan pengembangan kawasan budidaya seperti permukiman, perkantoran, industri, perdagangan dan jasa, pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Adanya terminal angkutan di Kecamatan Banjarbaru selatan sebagai sarana penunjang untuk pelayanan transportasi lokal dan antar daerah.
3. Penyediaan fasilitas umum di Kota Banjarbaru cukup beragam, memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan dan peribadatan.
4. Berpindahnya kantor Ibukota Provinsi ke Kota Banjarbaru sehingga meningkatkan pertumbuhan berbagai sektor.
5. Tingginya kontribusi sektor perangkutan dan komunikasi terhadap PDRB kota mengindikasikan bahwa peran kota Banjarbaru sebagai pintu gerbang dan simpul transportasi regional masih tumbuh dengan baik. Ini merupakan salah satu potensi yang perlu diperkuat dan dikembangkan sebagai penggerak ekonomi kota di masa mendatang dalam menghadapi persaingan ekonomi regional.
6. Kota Banjarbaru merupakan jalur lintasan Trans Kalimantan sehingga memiliki potensi perekonomian yang besar.
7. Keberadaan Bandar udara Syamsudin Noor telah menjadi pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa dari dan ke Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Timur dapat dikembangkan menjadi Bandar udara internasional.
8. Perpindahan pusat pemerintahan provinsi Kalimantan Selatan ke Kecamatan

Cempaka Kota Banjarbaru telah membuka akses bagi pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa di kawasan tersebut. Hal ini diharapkan akan menciptakan sumber pertumbuhan baru dan mengurangi disparitas / kesenjangan ekonomi, terutama di Kecamatan Cempaka.

9. Tumbuhnya kegiatan-kegiatan industri di Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang dapat dikembangkan menjadi kawasan aglomerasi industri ringan.

Dampak ekologis dari rusaknya DAS dan sub DAS (daratan dan perairan) adalah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang dirasakan hampir terjadi setiap tahun (musiman). Wilayah-wilayah di Kalimantan Selatan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah sehingga rawan bencana banjir antara lain: Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar di bagian utara, serta Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Wilayah yang rawan bencana banjir merupakan wilayah yang dilintasi sungai-sungai besar pada Sub DAS Barito. Sedangkan kondisi sungai-sungai ini mengalami pendangkalan akibat kerusakan parah pada kawasan hutan sepanjang DAS dan pegunungan Meratus, musibah banjir dan tanah longsor tidak bisa terelakkan lagi.

Selain permasalahan banjir dan longsor, pada musim kemarau di Kalimantan Selatan sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini merupakan produksi gas rumah kaca yang berdampak kepada pemanasan global.

Terdapat 656.743 hektar areal izin pertambangan berada di kawasan hutan. Sementara reklamasi dan rehabilitasi areal bekas pertambangan tersebut belum jelas keberhasilannya. Terdapat 761.043 hektar lahan kritis yang tersebar di beberapa kabupaten pada tahun 2009, dibandingkan dengan data pada tahun 2003 maka peningkatan laju lahan kritis mencapai 40.991 hektar per tahun, sementara laju reboisasi yang dilakukan belum seimbang.

Penentuan kemampuan lahan pada tingkat unit pengelolaan penting, terutama untuk melakukan evaluasi kecocokan penggunaan

lahan saat ini. Evaluasi kecocokan penggunaan lahan diperlukan sebagai masukan bagi revisi rencana tata ruang atau penggunaan lahan yang sudah ada.

Klasifikasi pada kategori unit pengelolaan memperhitungkan faktor-faktor penghambat yang bersifat permanen atau sulit diubah seperti tekstur tanah, lereng permukaan, drainase, kedalaman efektif tanah, tingkat erosi yang telah terjadi, liat masam (cat clay), batuan di atas permukaan tanah, ancaman banjir atau genangan air yang tetap. Faktor-faktor tersebut digolongkan berdasarkan besarnya intensitas faktor penghambat atau ancaman

Untuk menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perlu beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan tersebut adalah (a) ruang dan sifatnya, (b) tipe pemanfaatan ruang, (c) ukuran produk lingkungan hidup utama (udara dan air), (d) penggunaan/penutupan lahan mendukung publik (hutan), (e) penggunaan tertentu untuk keperluan pribadi. Identifikasi jenis tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:

Tabel 1 Tutupan Lahan di Kalimantan Selatan

No	Tutupan Lahan
1.	Bandara/ Pelabuhan
2.	Hutan Lahan Kering Primer
3.	Hutan Lahan Kering Sekunder
4.	Hutan Mangrove Primer
5.	Hutan Mangrove Sekunder
6.	Hutan Tanaman
7.	Perkebunan
8.	Permukiman
9.	Pertambangan
10.	Pertanian Lahan Kering
11.	Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak
12.	Rawa
13.	Sawah
14.	Semak Belukar
15.	Semak Belukar Rawa
16.	Tambak
17.	Tanah Terbuka
18.	Transmigrasi
19.	Tubuh Air

Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Selatan
Identifikasi daerah aliran sungai (DAS) di Provinsi Kalimantan Selatan sejumlah 41

DAS dan Sub DAS. Penamaan DAS dan Sub DAS sebagai berikut:

Tabel 2. Daerah Aliran Sungai di Provinsi Kalimantan Selatan

No	Nama DAS	Kabupaten
1.	DAS Asam-Asam	Banjar, Tanah Laut
2.	DAS Bangkalaan	Kotabaru
3.	DAS Batulicin	Kotabaru, Tanah Bumbu
4.	DAS Cantung	Kotabaru, Tanah Bumbu
5.	DAS Cengal	Balangan, Kotabaru
6.	DAS Kendilo	Tabalong
7.	DAS Kep Serudung	Kotabaru
8.	DAS Kintap	Banjar, Tanah Laut
9.	DAS Kusan	Banjar, Kotabaru, Tanah Bumbu
10.	DAS Maluka	Banjar, Banjarbaru, Tanah Laut
11.	DAS Das Manunggul	Kotabaru
12.	DAS P Kerasian	Kotabaru
13.	DAS P Kerayaan	Kotabaru
14.	D DAS P Kerumputan	Kotabaru
15.	DAS P Kunyit	Kotabaru
16.	DAS P Terusan Tengah	Kotabaru
17.	DAS Pulau Laut	Kotabaru
18.	DAS Pulau Sebuku	Kotabaru
19.	DAS Rongan	Tabalong
20.	DAS Sampanahan	Balangan, Banjar, HSS, HST, Kotabaru
21.	DAS Satui	Banjar, Tanah Bumbu, Tanah Laut
22.	DAS Sebamban	Tanah Bumbu
23.	DAS Sebuhr	Tanah Laut
24.	DAS Senakin	Kotabaru
25.	DAS Senipah	Tanah Laut
26.	DAS Swarangan	Tanah Laut
27.	DAS Tabunio	Banjar, Tanah Laut
28.	DAS Takisung	Tanah Laut
29.	DAS P Sembilan	Kotabaru
30.	Sub DAS Alalak	Banjar, Barito Kuala, Tapin
31.	Sub DAS Amandit	Banjar, HSS, HST, Kotabaru, Tapin
32.	Sub DAS Balangan	Balangan, HST, Kotabaru, Tabalong
33.	Sub DAS Barito Hilir	Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin, Barito

No	Nama DAS	Kabupaten
		Kuala, HSS, HSU, Tabalong, Tanah Laut, Tapin
34.	Sub DAS Batang Alai-Pitap	Balangan, HSS, HST, Kotabaru
35.	Sub DAS Dadap	Banjar, Tanah Bumbu
36.	Sub DAS Martapura	Banjar, Banjarbaru, Barito Kuala, HSS, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin
37.	Sub DAS Negara	Balangan, Banjar, HSS, HST, HSU, Tabalong, Tapin
38.	Sub DAS S Alat	Banjar, Tanah Bumbu
39.	Sub DAS Tabalong	Balangan, HSU, Tabalong
40.	Sub DAS Tamunih	Banjar, Tanah Bumbu
41.	Sub DAS Tapin	Banjar, HSS, Tapin

Sumber: Analisa Tahun 2016

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun airtanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industry maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisicurah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air(akuifer).Air bersih merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat sehingga mempunyai peran penting dalam kehidupan. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersihbaik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasukkapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakanuntuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa.

Selain bahan pangan hal lain yang juga merupakan kebutuhan utama bagi manusia adalah ketersediaan air bersih. Air bersih juga merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah.

Berdasarkan tabel analisa daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem

penyediaan air bersih di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan region DAS yang memiliki kemampuan daya dukung daya tampung sangat rendah dan rendah ditinjau dari morfologi fisik alam cenderung pegunungan maupun perbukitan sehingga untuk mendapatkan air cukup rentan ketersediaan air walaupun di daerah hulu merupakan pegunungan dan perbukitan yang baik sebagai daerah tangkapan air. Sedangkan daya dukung daya dukung daya tampung lingkungan DAS dalam penyediaan air bersih di Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan sedang berada daerah perbukitan dengan kemiringan lereng 15-25% dengan tataguna lahan yang mudah ditemui perkebunan, semak belukar, pertanian lahan kering campur, semak belukar dan semak belukar rawa. Daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan kategori tinggi berdasarkan morfologi permukaan datar dengan kemiringan lereng 0-2% dengan tata guna lahan yang mudah ditemui antara lain: ruang terbuka, tambak, permukiman, pertambangan, transmigrasi, tubuh air dan rawa.

Berdasarkan analisa daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem biodiversitas di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari DAS dan Sub DAS yang terdiri setiap Kabupaten/ Kota dengan kategori rendah dan sangat rendah dengan tata guna lahan pertanian lahan kering, ruang terbuka hijau, tambak, sawah, permukiman, transmigrasi, tubuh air dan rawa. Sedangkan daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem dengan kategori sedang dengan tataguna lahan yang mudah ditemui antara lain: hutan tanaman, perkebunan, semak belukar, pertanian lahan kering campur, semak belukar dan semak belukar rawa. Analisa daya dukung daya tampung dengan kategori tinggi dapat diketahui dengan tata guna lahan dengan hutan primer berupa: lahan kering dan mangrove.

Berdasarkan hasil analisis daya dukung daya tampung dan jasa ekosistem Estetika Alam dengan kategori rendah dan sangat rendah dipengaruhi oleh morfologi datar dan perbukitan yang berkisar 0-2 % dan 15-25 %. Sedangkan daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem estetika dengan kategori sedang berdasarkan morfologi pegunungan dan perbukitan dengan kelerengan 25-40% dengan

tata guna lahan hutan sekunder lahan kering. Daya dukung daya tampung lingkungan dan ekosistem estetika alam dengan kategori tinggi dan sangat tinggi dengan morfologi landai, perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan 2-15%, 15-25% dan 25-40%.

Berdasarkan analisa daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem genetika dengan kategori rendah dan sangat rendah dapat ditemui perkebunan, hutan tanaman, pertanian lahan kering, ruang terbuka hijau, sawah, tambak, permukiman, pertambangan, transmigrasi, tubuh air, perkebunan, hutan tanaman dan pertanian lahan kering. Sedangkan daya dukung daya tampung lingkungan dengan jasa ekosistem genetika dengan kategori sedang dapat ditemui pemanfaatan lahan semak belukar, pertanian lahan kering, campur semak belukar dan semak belukar rawa. Daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem genetik dengan kategori tinggi dapat diperhatikan dari tata guna lahan antara lain hutan primer dan hutan sekunder berupa: lahan kering, mangrove dan rawa.

Berdasarkan hasil analisis daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem unsur hara Provinsi Kalimantan Selatan dapat diketahui kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Daya dukung daya tampung lingkungan dengan kategori unsure hara sangat rendah dapat diketahui dari tata guna lahan yang memiliki kecenderungan ruang terbuka, sawah, tambak, permukiman, pertambangan, transmigrasi, tubuh air dan rawa. Sedangkan daya dukung dan daya tampung dengan unsur hara kategori rendah memiliki kecenderungan tata guna lahan perkebunan, hutan tanaman dan pertanian lahan kering. Daya dukung daya tampung penyediaan unsur hara dengan kategori sedang memiliki kecenderungan tataguna lahan seperti: semak belukar, pertanian lahan kering campur semak belukar, dan semak belukar rawa. Sedangkan daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem dengan penyediaan unsur hara kategori tinggi dan sangat tinggi memiliki kecenderungan tata guna lahan hutan primer dan hutan sekunder berupa lahan kering, mangrove dan rawa.

Berdasarkan analisa daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem penyedia pangan dapat diketahui kategori

sangat rendah ketika sistem lahan di daerah tersebut berupa: Maput, Bukit Pandan, Beriwit, Pendreh, Teweh, Lohai, Luang, Mantalat, Sungai Seratai, Okki, Pakalunai, Honja, Gambut, Mendawai, Telawi, Tewai Baru, Gunung Diangan. Daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem dengan kategori rendah dapat diketahui sistem lahan di daerah tersebut bercirikan Puting, Kajapah. Daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem dengan kategori sedang dapat diketahui kondisi sistem lahan di daerah tersebut berupa: Pakau, Klaru, Barah. Daya dukung daya tampung dengan kategori tinggi dapat diketahui sistem lahan di daerah tersebut bercirikan Lawanguwang, Kapor, Bakunan, Tanjung, Rangankau, Kahayan.

Berdasarkan analisa daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem produksi primer dapat diketahui kategori rendah ketika tata guna lahan di daerah tersebut berupa: Pertanian lahan kering, Terbuka, Sawah, Tambak, Permukiman, Pertambangan, Transmigrasi, Tubuh Air, Rawa. Daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem dengan kategori rendah dapat diketahui sistem lahan di daerah tersebut bercirikan Puting, Kajapah. Daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem dengan kategori sedang dapat diketahui kondisi tata guna lahan di daerah tersebut berupa: Hutan tanaman, Perkebunan, Semak belukar, Pertanian lahan kering campur semak belukar, Semak belukar rawa. Daya dukung daya tampung dengan kategori tinggi dapat diketahui tata guna lahan di daerah tersebut bercirikan Hutan primer dan hutan sekunder berupa lahan kering, mangrove dan rawa.

Berdasarkan analisa daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem produksi primer dapat diketahui kategori rendah ketika tata guna lahan di daerah tersebut berupa: Pertanian lahan kering, Terbuka, Sawah, Tambak, Permukiman, Pertambangan, Transmigrasi, Tubuh Air, Rawa. Daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem dengan kategori rendah dapat diketahui sistem lahan di daerah tersebut bercirikan Puting, Kajapah. Daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem dengan kategori sedang dapat diketahui kondisi tata guna lahan

di daerah tersebut berupa: Hutan tanaman, Perkebunan, Semak belukar, Pertanian lahan kering campur semak belukar, Semak belukar rawa. Daya dukung daya tampung dengan kategori tinggi dapat diketahui tata guna lahan di daerah tersebut bercirikan Hutan primer dan hutan sekunder berupa lahan kering, mangrove dan rawa.

Berdasarkan daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem penyediaan serat dan bioenergi dapat diketahui ketika daerah tersebut dalam penyediaannya dikategorikan sangat rendah dan rendah maka daerah tersebut memiliki kecenderungan penggunaan lahan sebagai ruang terbuka, sawah, tambak, permukiman, pertambangan, transmigrasi, tubuh air, rawa, pertanian lahan kering, semak belukar rawa, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa sekunder. Sedangkan daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem dalam penyediaan serat dan bioenergi dikategorikan sedang maka dapat diketahui ciri penggunaan lahan di daerah tersebut berupa: perkebunan, hutan tanaman, pertanian lahan kering campur semak belukar, semak belukar. Daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem dengan kategori tinggi dalam penyediaan serat dan bio energi maka dapat diketahui di daerah tersebut dominan pemanfaatan lahan berupa: hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder.

Berdasarkan analisa daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan dapat diketahui kategori sangat rendah ketika sistem lahan di daerah tersebut berupa: Gambut, Pendreh. Daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem dengan kategori rendah dapat diketahui sistem lahan di daerah tersebut bercirikan Barah, Beriwit, Gambut, Gunung Dianga, Lohai, Luang, Okki, Pakalunai, Pakau, Pendreh, Puting, Sungai Seratai, Tewai Baru. Daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem dengan kategori sedang dapat diketahui kondisi sistem lahan di daerah tersebut berupa: Bakunan, Barah, Bukit Pandan, Gunung Dianga, Honja, Kahayan, Kajapah, Kapor, Klaru, Lawanguwang, Lohai, Luang, Mantalat, Maput, Mendawai, Okki, Pakalunai, Pakau, Pendreh, Puting, Rangankau, Sungai Seratai, Tanjung,

Telawi, Tewai Baru, Teweh,. Daya dukung daya tampung dengan kategori tinggi dalam pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan dapat diketahui sistem lahan di daerah tersebut bercirikan Bukit Pandan, Kahayan, Kajapah, Kapor, Lawanguwang, Maput, Mendawai dengan kedalaman solum mencapai 101 – 150 Cm dan > 150 Cm, serta kapasitas tukar kation >40 meq/100 g.

Berdasarkan daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem penyediaan tempat tinggal dan ruang hidup dapat diketahui ketika daerah tersebut dalam penyediaannya dikategorikan sangat rendah dan rendah maka daerah tersebut memiliki kecenderungan morfologi fisik alam berupa daerah pegunungan dan perbukitan. Sedangkan daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem dalam penyediaan serat dan bioenergi dikategorikan sedang maka dapat diketahui ciri morfologi daerah berupa perbukitan. Daya dukung daya tampung lingkungan dan jasa ekosistem dengan kategori tinggi dan sangat tinggi dalam penyediaan tempat tinggal dan ruang hidup maka dapat diketahui di daerah tersebut memiliki morfologi berupa daerah landai dan datar dengan kemiringan lereng 0-15%.

KESIMPULAN

Untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan SDA, pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, UU Nomor 32/2009 memandatkan perlu diperkuatnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan LH (RPPLH). Rencana perlindungan dan pengelolaan LH terdiri dari empat muatan, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, UU Nomor 32/2009 memandatkan bahwa untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan LH harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tiga asas dari Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas, yakni (1) kearifan lokal; (2) tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) otonomi daerah. (pasal 2 UU 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lebih lanjut Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditujukan antara lain menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global. (Pasal 3). Berkaitan dengan Pencegahan digunakan Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas pasal 14 UU No 32 Tahun 2009)

1. KLHS;
2. Tata ruang;
3. Baku mutu lingkungan hidup;
4. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
5. AMDAL;
6. UKL-UPL;
7. Perizinan;
8. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
9. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
10. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
11. Analisis risiko lingkungan hidup;
12. Audit lingkungan hidup; dan
13. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan

Perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat umum yang bersifat kolektif, secara sendiri-sendiri atau secara bersamaandengan melibatkan ketiga komponen tersebut. Oleh karena itu, partisipasi dan kemitraan menjadi kata kunci dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan yang berkelanjutan.

1) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu usaha terencana untuk melibatkan masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dalam proses pembuatan keputusan (decision making) dalam kaitannya dengan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dapat mencegah atau menyelesaikan konflik melalui komunikasi dua arah yang terus menerus, dan menguntungkan berbagai pihak yang terlibat. Mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup banyak memberikan keuntungan, di antaranya penelaahan kebutuhan dan masalah lingkungan yang lebih akurat, meningkatkan kredibilitas perencanaan lingkungan hidup, teridentifikasi solusi-solusi alternatif yang dapat diterima secara sosial, dan menciptakan rasa memiliki atas rencana pengelolaan yang ditetapkan. Partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan, termasuk dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri atas 3 (tiga) macam tahapan keterlibatan, yaitu:

1. pada tahap pembuatan keputusan, yang sejak awal masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan perancangan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta dalam membuat keputusan yang akan dilaksanakan;
2. pada tahap pelaksanaan (implementasi), bahwa masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, sekaligus dapat menjadi mengontrol bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup direncanakan dan diputuskan, serta dilaksanakan oleh bersama-sama masyarakat dengan pihak-pihak lain; dan
3. pada tahap evaluasi, bahwa keterlibatan masyarakat juga akan memberikan manfaat bagi keseluruhan kegiatan apabila mereka dilibatkan dalam evaluasi-evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat secara nyata dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah membangun kemitraan di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap sumberdaya alam dan lingkungan yang dikelola (Mitchell, 1997). Selanjutnya didefinisikan bahwa kemitraan adalah:

“A partnership is a mutually agreed arrangement between two or more public, private or non-government organizations to achieve a jointly determined goal or objective, or to implement a jointly determined activity, for the benefit of environment and society”.

2) Kemitraan

Kemitraan juga memiliki beberapa elemen kunci, di antaranya: saling percaya dan menghargai (compatibility), memberi manfaat bagi semua pihak, wewenang dan keterwakilan yang sederajat, komunikasi, adaptabilitas, dan integritas. Upaya pengembangan partisipasi dan kemitraan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan, maka perlu dilakukan:

1. identifikasi kelembagaan atau stakeholders yang terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi berbagai pihak, yaitu: institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada umumnya, dengan kemitraan yang dibentuk bisa melibatkan dua pihak yang terkait atau lebih; dan
2. perumusan bentuk kemitraan, melalui kajian status dan peran dari masing-masing pihak yang terlibat (hak dan kewajiban), yang sangat bergantung dari peran dan kedudukan masing-masing pihak. Misalnya pemerintah dan masyarakat menjadi pelaksana perlindungan dan pengelolaan lingkungan, atau menjadi supervisor ketika pelaksanaannya dilakukan swasta.

Keterlibatan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat akan lebih membantu dalam pengembangan kemitraan. Perguruan Tinggi berperan membantu upaya memahami permasalahan, pemecahan masalah, dan perumusan kemitraan yang dapat dikembangkan; sedangkan LSM membantu pelaksanaan kemitraan dengan menjadi fasilitator atau pendamping. Hal yang penting adalah keterlibatan masyarakat sejak awal secara utuh mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengelo-
laan Air tanah;

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang
Konservasi Sumberdaya Alam dan
Hayati;

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang
Pengelolaan Sumberdaya Air;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan;